

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. *Good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Artinya, untuk mendapatkan kinerja yang baik, sangat diperlukan penerapan tata kelola yang baik dan benar. Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance* yang kuat akan menimbulkan dampak positif untuk Kinerja SKPD.
2. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Artinya, semakin memadai dan kuat pengendalian internalnya, maka kualitas kinerja akan semakin tercipta dengan baik. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga akan semakin baik.
3. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Artinya, untuk mendapatkan kinerja yang baik, maka komitmen organisasi dalam pemerintahan harus baik. Semakin tingginya komitmen organisasi maka akan dapat meningkatkan kinerja SKPD di Pemerintah Daerah secara signifikan. Sebaliknya, jika rendahnya komitmen organisasi maka akan dapat menurunkan kinerja SKPD di Pemerintah Daerah.

5.2. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Pemerintah Kabupaten Cirebon harus tetap menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, karena terbukti dapat meningkatkan kinerja SKPD. Salah satu penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Kabupaten Cirebon resmi mengeluarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep. 15 – Insp/2017 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Pemberantasan pungli merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka menciptakan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Cirebon dan akan menimbulkan dampak positif dari Kinerja satuan kerja perangkat

daerah (SKPD). *Good governance* berperan sebagai alat ukur menilai Kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, pengendalian intern juga mempengaruhi kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pengendalian Internal ini terkait dengan bagaimana individu dalam instansi melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, kebijakan, dan otoritas yang ada, secara bersama-sama, guna mencapai tujuan instansi. Pengendalian Internal yang berjalan dengan efektif dan efisien, secara optimal, akan membawa dampak yang baik pada Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Selain *good governance* dan pengendalian intern yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah komitmen organisasi. Dengan menerapkan *good governance* dan Sistem Pengendalian Internal yang baik dan komitmen pegawai terhadap organisasi (komitmen organisasi) diwujudkan dengan menunjukkan kinerja yang seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Komitmen yang tinggi akan membuat individu organisasi berusaha keras mencapai tujuan organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi. Ini terbukti variabel komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja SKPD dari variabel yang lain. Sehingga apabila pemerintah menerapkan prinsip - prinsip *good governance* dengan sistem pengendalian intern yang baik serta pegawai berkomitmen untuk mewujudkannya, sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengaruh *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi khususnya pada sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian tentang variabel-variabel lain yang berpengaruh pada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman ilmiah. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Agar diperoleh hasil yang lebih baik, berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat responden yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon terhadap Kinerjanya, peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan kemungkinan terjadinya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan.
2. Temuan dari penelitian membuktikan bahwa bahwa *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD, dengan nilai *Adjusted R Square* adalah 0,520 atau sebesar 52,0%, sedangkan 48,0% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti, sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya. Selain *Good Governance*, Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi terdapat faktor-faktor lain yang digunakan dalam studi mengenai Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

3. Dalam Penyebaran kuesioner, bertepatan pula dengan penyelesaian laporan-laporan akhir tahun anggaran, menyebabkan tingkat kesibukan responden rata-rata cukup tinggi. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi, pada beberapa responden harus didatangi lebih dari dua kali.

5.4. Saran

1. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
2. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya menambah variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti budaya organisasi, komunikasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), sistem keuangan daerah dan lain-lain. Atau memperluas objek penelitian sebagai pembanding, misalnya lingkup penelitian pemerintah daerah se-provinsi Jawa Barat, atau perbandingan antar kabupaten/kota, atau menambah populasi yang lebih luas dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
3. Apabila akan melakukan penelitian pada sektor publik, khususnya yang menggunakan pemerintah daerah sebagai objek penelitian sebaiknya tidak dilaksanakan pada saat-saat kesibukan tinggi, misalnya akhir tahun dan awal tahun. Hal ini disebabkan responden sangat sibuk menyelesaikan laporan-laporan akhir tahun. Mungkin bila dilakukan pada bulan maret tingkat pengembalian kuesioner akan lebih tinggi. Dengan asumsi pada bulan tersebut semua laporan sudah selesai dan kegiatan untuk tahun bersangkutan belum mulai padat.